



# Analisis Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di 5 Kabupaten Provinsi Jawa Timur

Syafrida Maulidyah<sup>1</sup>, dan Arief Bachtiar<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ; Jl.Rungkut Madya, Gn.Anyar, Kec.Gn,Anyar, Surabaya Jawa Timur; e-mail : [21011010103@student.upnjatim.ac.id](mailto:21011010103@student.upnjatim.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur ; Jl.Rungkut Madya, Gn.Anyar, Kec.Gn,Anyar, Surabaya Jawa Timur; e-mail : [ariefbachtiar@upnjatim.ac.id](mailto:ariefbachtiar@upnjatim.ac.id)

\* Corresponding Author : Arief Bachtiar

**Abstract:** Income distribution inequality remains one of the major challenges in economic development, as it illustrates disparities in welfare across individuals and regions. This study seeks to examine the determinants that influence income inequality across five districts. The variables analyzed include per capita expenditure, average years of schooling, life expectancy, and early marriage. A quantitative research design was employed through panel data regression analysis using a fixed effect model covering the period from 2013 to 2023. The results reveal that higher per capita expenditure contributes a significant positive impact on income inequality, whereas the average years of schooling (RLS) variable shows a negative yet insignificant relationship. In contrast, life expectancy (AHH) and early marriage both display negative and significant effects. These outcomes highlight the necessity for government policies that enhance human capital quality, curb early marriage practices, and promote equitable access to education and healthcare services to narrow income inequality.

**Keywords :** Income distribution inequality; per capita spending; average length of schooling (RLS); life expectancy (AHH); and early marriage

**Abstrak:** Ketimpangan dalam distribusi pendapatan merupakan isu krusial dalam pembangunan ekonomi, yang mencerminkan perbedaan kesejahteraan antar individu dan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan guna menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan dalam distribusi pendapatan di lima kabupaten. Fokusnya adalah pada pengeluaran per kapita, rata-rata tahun sekolah, harapan hidup, dan pernikahan dini. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan menggunakan regresi data panel menggunakan model efek tetap untuk periode 2013–2023. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita memiliki dampak positif yang signifikan, sedangkan variabel (RLS) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan, serta variabel (AHH) memiliki efek negatif dan signifikan. Sementara itu, pernikahan dini memiliki efek negatif dan signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya kebijakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengendalikan pernikahan dini, dan pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan untuk mengurangi ketimpangan.

**Kata kunci:** Ketimpangan pendapatan; tingkat pengeluaran per kapita; rata-rata lama menempuh pendidikan (RLS); harapan hidup (AHH); serta praktik pernikahan usia muda.

## 1. Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah karena berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan

Naskah Masuk: 5 November 2025

Revisi: 8 Desember 2025

Diterima: 18 Maret 2026

Terbit: 30 Maret 2026

Ver. Skrg.: 30 Maret 2026



Copyright: © 2026 by the authors.  
Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

hidup secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pembangunan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata[1]. Oleh karena itu, pemerintah berperan sebagai *agent of development* yang bertanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan berdampak pada peningkatan kesejahteraan jangka pendek dan jangka panjang[2]. Namun, peningkatan kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari persoalan distribusi pendapatan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi berpotensi menghambat pembangunan karena manfaat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, sementara kelompok berpendapatan rendah mengalami keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi.

Kondisi ini menjadi semakin relevan dalam konteks Indonesia, di mana penyusutan kelas menengah menunjukkan adanya tekanan struktural dalam distribusi kesejahteraan. Data *Financial Times* (2025) mencatat bahwa jumlah kelas menengah Indonesia menurun signifikan dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 47,9 juta orang pada 2024. Fenomena ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu melindungi kelompok rentan dari penurunan kesejahteraan akibat kenaikan biaya hidup yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pendapatan. Fenomena makro tersebut tercermin dalam perkembangan Rasio Gini Indonesia, yang menunjukkan ketimpangan pendapatan relatif tinggi di wilayah perkotaan dibandingkan perdesaan. Ketimpangan yang lebih tinggi di perkotaan mengindikasikan adanya konsentrasi pendapatan pada kelompok tertentu, sementara wilayah perdesaan meskipun berpendapatan rendah justru memiliki distribusi yang relatif lebih merata. Kondisi ini menguatkan argumen bahwa ketimpangan rendah tidak selalu mencerminkan kesejahteraan tinggi, melainkan dapat menunjukkan keseragaman pendapatan pada level rendah[3].

Pada level regional, Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu kontributor PDRB terbesar di Indonesia menghadapi tantangan serupa. Struktur ekonomi yang beragam dan jumlah penduduk yang besar menyebabkan adanya disparitas kesejahteraan antarwilayah. Kota Surabaya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi membentuk kawasan penyangga yang terdiri atas Kabupaten Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Lamongan, dan Sidoarjo. Secara teoritis, kedekatan dengan pusat ekonomi seharusnya mendorong pemerataan pertumbuhan. Namun, data menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi antar kabupaten penyangga tersebut tidak berlangsung secara seragam, sehingga memunculkan variasi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan.

Perbedaan ketimpangan antar kabupaten tersebut berkaitan erat dengan faktor ekonomi dan sosial yang memengaruhi kemampuan masyarakat dalam mengakses peluang ekonomi. Pengeluaran per kapita mencerminkan daya beli dan standar hidup masyarakat; perbedaan pengeluaran antar kabupaten menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata. Rata-rata lama sekolah (RLS) menggambarkan kualitas modal manusia yang berperan penting dalam menentukan produktivitas dan peluang kerja, sementara angka harapan hidup (AHH) mencerminkan kualitas kesehatan yang berimplikasi langsung terhadap kapasitas kerja dan partisipasi ekonomi. Di sisi lain, pernikahan dini sebagai fenomena sosial-kultural berpotensi membatasi akumulasi modal manusia karena berkaitan dengan putus sekolah, rendahnya keterampilan, dan dominasi pekerjaan berupah rendah[4].

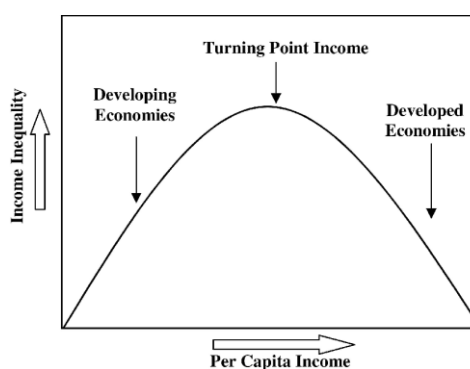
Dengan demikian, penyusutan kelas menengah pada tingkat nasional dapat dipahami sebagai manifestasi dari ketimpangan struktural yang juga terjadi pada tingkat regional dan lokal. Ketimpangan distribusi pendapatan di lima kabupaten penyangga Surabaya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor sosial dan demografis yang memengaruhi kualitas sumber daya manusia[5]. Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik menganalisis pengaruh pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, dan pernikahan dini terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di lima kabupaten Provinsi Jawa Timur.

## 2. Review Kajian Pustaka atau Penelitian Terkait

## 2.1. Landasan Teori

### a) Teori Ketimpangan

Berdasarkan teori Neoklasik, terdapat perkiraan hubungan antara laju pembangunan perekonomian serta ketimpangan pendapatan setiap wilayah. Konsep ini didukung oleh hipotesis "U-terbalik" diperkenalkan Simon Kuznets, 1995[6]. Dalam perawalan pertumbuhan ekonomi atau permulaan pembangunan, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat. Namun, seiring dengan berjalannya proses pembangunan, ketimpangan tersebut akan menurun. Fenomena ini terjadi karena pada awal pembangunan, wilayah telah lebih berkembang cenderung lebih mampu memanfaatkan peluang ekonomi. Sebaliknya, daerah tertinggal menghadapi hambatan dalam mengakses potensi pembangunan akibat keterbatasan infrastruktur, fasilitas pendukung, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia.



Gambar 1. Kurva Kuznet

### b) Teori Pengeluaran Perkapita

Dijelaskan Keynes merupakan analisis faktual, saat individu memperoleh kenaikan tambahan cenderung kenaikan konsumsi, tetapi tidak secara proporsional bertambahnya tersebut. Konsep dijelaskan melalui (*Marginal Propensity to Consume/MPC*), proporsi tambahan pendapatan berkisar 0-1. Semakin tinggi MPC, semakin besar proporsi pendapatan tambahan dibelanjakan, sedangkan jika MPC rendah, sebagian besar pendapatan tambahan akan disimpan. Dengan demikian, peningkatan pendapatan cenderung mendorong peningkatan konsumsi, meskipun tidak dalam jumlah sama dengan pertambahan pendapatan itu sendiri[7].

### c) Teori Human Capital

Disampaikan Gary S. Becker, tingkat pendidikan lebih tinggi berkontribusi pada peningkatan keterampilan dan produktivitas individu. Hal ini memungkinkan seseorang untuk memperoleh pekerjaan lebih baik serta menerima upah lebih tinggi[8]. Selain itu berkontribusi pertumbuhan, berimplikasi ketidakmerataan distribusi pendapatan, melalui ini SDM meningkat. Seseorang dapat berinvestasi untuk meningkatkan konsumsi di masa depan, investasi tersebut meliputi pendidikan dan kesehatan, pendidikan lebih tinggi berperan dalam membentuk pola pikir serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sementara itu, kesehatan baik memungkinkan individu untuk lebih produktif dalam menjalankan aktivitasnya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian dari temuan beberapa studi terdahulu yang relevan di antaranya:

- Penelitian yang menelaah faktor-faktor penyebab ketimpangan pendapatan Provinsi di Daerah Istimewa Yogyakarta mengungkapkan bahwa variabel pengeluaran per-kapita memiliki bentuk pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, lama sekolah rata-rata serta upah minimum menggambarkan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat ketimpangan tersebut.
- Studi yang berfokus pada determinan disparitas pendapatan di kota/kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2017–2021 menemukan bahwa produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah tenaga kerja, tingkat pengeluaran, dan pendidikan memiliki hubungan positif terhadap tingkat ketimpangan atau disparitas distribusi pendapatan pada wilayah tersebut.
- Kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi distribusi nilai pendapatan pada kawasan Sulawesi menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita memberikan pengaruh

positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara rata-rata lama sekolah (RLS) berpengaruh signifikan dan negatif. Di sisi lain, angka harapan hidup (AHH) memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### 3. Metode Yang Diusulkan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data dikumpulkan dari berbagai publikasi resmi BPS yang diakses pada tahun 2024, baik melalui website BPS. Unit analisis mencakup lima kabupaten, dengan periode 2013–2023. Variabel ketimpangan distribusi pendapatan diukur menggunakan Indeks Gini, yang diperoleh dari publikasi BPS(Kode Publikasi BPS: 06220.2401). Variabel pengeluaran per kapita menggunakan indikator rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per tahun, yang bersumber dari publikasi “Statistik Kesejahteraan Rakyat” (Kode Publikasi BPS: 11010.2401)[9].

Variabel Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) diperoleh dari publikasi “Indeks Pembangunan Manusia” (Kode Publikasi BPS: 11020.2401), di mana RLS digunakan sebagai indikator pendidikan dan AHH sebagai indikator kesehatan masyarakat. Sementara itu, variabel pernikahan dini diukur menggunakan persentase penduduk yang menikah di bawah usia minimum perkawinan, yang bersumber dari “Statistik Kesejahteraan Rakyat” dan “Statistik Sosial dan Kependudukan” (Kode Publikasi BPS: 41020.2401)[10].

Penelitian menggunakan regresi data panel merupakan bentuk pengembangan dari analisis regresi yang mengkombinasikan dua jenis data, yaitu data time series dan cross section[11], pada analisis data panel terdapat tiga pendekatan utama, yaitu *CEM*, *FEM*, dan *REM*. Model tepat ditetapkan setelah melalui proses pengujian dengan mempertimbangkan adanya heterogenitas antar unit dan dilakukan dengan melalui serangkaian uji seperti uji Chow, Hausman, serta Lagrange Multiplier (Breusch-Pagan) untuk memastikan model yang dipilih paling sesuai dengan karakteristik data.

$$KP_{it} = \alpha + \beta_1 PP_{it} + \beta_2 RLS_{it} + \beta_3 AHH_{it} + \beta_4 PD_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- KP = Ketimpangan pendapatan
- PP = Pengeluaran perkapita.
- RLS = Rata-rata lama sekolah
- AHH = Angka harapan hidup
- PD = Pernikahan dini
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \dots, \beta_4$  = Koefisien
- $i$  = Cross section (5 Kabupaten)
- $t$  = Time series (2013- 2023)
- $\epsilon$  = Standar error (Variabel pengganggu)

### 4. Hasil dan Pembahasan

#### 4.1. Uji Penentuan Model

a. Uji Chow

Tabel 1.Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.188455	(4,46)	0.0215

Cross-section Chi-square	13.459314	4	0.0092
--------------------------	-----------	---	--------

Berdasarkan tabel, diperoleh Cross-section F(0.0215) dan nilai probabilitas Cross-section Chi-square (0.00092) < nilai signifikansi (0,05) artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga hasil menunjukkan bahwa model tepat dan terbaik dalam pengujian Uji Chow 857 adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji Hausman

Tabel 2. Uji Hausman

Correlated Random Effects – Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.753822	4	0.0125

Berdasarkan tabel diperoleh Chi-Square Statistic (12.753822) dengan probabilitas (0.0125) < nilai signifikansi (0,05) artinya  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima sehingga hasil menunjukkan bahwa model tepat dan terbaik dalam pengujian Uji Hausman 857 adalah *Fixed Effect Model*.

c. Uji Langrange Multiplier

Tabel 3. Uji LM

Correlated Random Effects – Hausman Test  
Equation: Untitled  
Test cross-section random effects

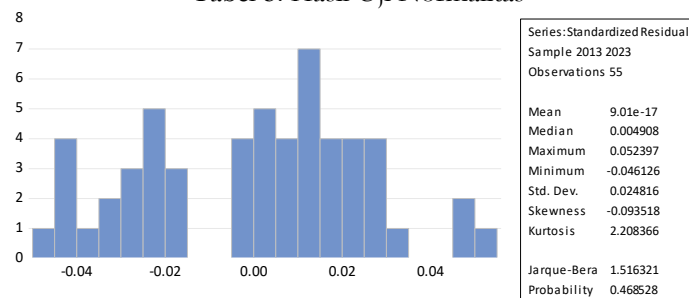
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.753822	4	0.0125

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh probabilitas cross-section pagan (0.3902), Time (0.8087) dan both (0.3720) > signifikansi (0.05) artinya,  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak bahwa model tepat dan terbaik dalam pengujian *Command Effect Model*. Namun, mengingat hasil uji Chow dan Hausman sebelumnya telah menunjukkan bahwa *Fixed Effect Model* paling tepat, maka hasil uji LM ini tidak lagi menjadi pertimbangan utama.

4.2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas



Bahwa nilai probabilitas Jarque-Bera (1.516321). Normalitas distribusi residual mengindikasikan salah satu asumsi klasik dalam model regresi telah terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinieritas

	PP	RLS	AHH	PD
PP	1.000000	0.746161	0.179861	-0.609674
RLS	0.746161	1.000000	0.258723	-0.509862
AHH	0.179861	0.258723	1.000000	-0.221088
PD	-0.609674	-0.509862	-0.221088	1.000000

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, seluruh variabel independen memiliki nilai keterkaitan di bawah (0.8). Dengan demikian, model dinyatakan bebas gejala multikolinearitas atau tidak mengalami masalah multikolinearitas Gujarati (2013).

c. Uji Heterokedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Prob.
C	0.9075
PP	0.3831
RLS	0.2156
AHH	0.9396
PD	0.5770

Hasil uji menjelaskan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai probabilitas di atas tingkat signifikansi ( $>0.05$ ). Model regresi digunakan tidak terindikasi mengalami permasalahan heteroskedastisitas Ghozali (2018).

4.3. Uji Statistik

a. Uji T

Tabel 8 Uji T

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.568319	0.108490	5.238427	0.0000
PP	0.011077	0.004231	2.618257	0.0117
RLS	-0.008560	0.006972	-1.227636	0.2253
AHH	-0.003738	0.001425	-2.623030	0.0115
PD	-0.002081	0.000758	-2.746059	0.0084

Pengujian secara parsial terhadap pengaruh setiap variabel independen terhadap nilai variabel dependen dilakukan dengan menggunakan uji t untuk menilai signifikansinya, probabilitas ( $<0.05$ ) maka pengaruhnya signifikan[12]. Pengeluaran per kapita pengaruh positif dan signifikan (Prob.  $0.0117 < 0.05$ ) terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan, dan rata lama bersekolah pengaruh negatif dan tidak signifikan (Prob.  $0.2253 > 0.05$ ), angka harapan hidup pengaruh negatif dan signifikan (Prob.  $0.0115 < 0.05$ ), pernikahan dini pengaruh negatif juga signifikan (Prob  $0.0084 < 0.05$ ).

b. Uji F

Tabel 6. Hasil Uji F

F-statistic	18.34406
Prob(F-statistic)	0.000000

Nilai sebesar (18.34406) diperoleh dari hasil uji F dilakukan pada model regresi sebesar (0.000000). Karena nilai probabilitas tersebut lebih rendah dari tingkat signifikan 0.05 ( $0.000000 < 0.05$ ). Dengan demikian, secara kolektif variabel independen dalam model berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

### c. Uji R<sup>2</sup>

Tabel 7. Hasil Uji R<sup>2</sup>

R-squared	0.594736
Adjusted R-squared	0.562314
S.E. of regression	0.025789

Nilai koefisien determinasi diperoleh dari hasil pengolahan data senilai (0.594736) setara dengan (59.47%), mengindikasikan variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan oleh seluruh variabel independen yang digunakan dalam model.(59.47%). Untuk proporsi lainnya (40.53%) adanya pengaruh dari variabel eksternal tidak dimasukkan dalam model, namun tetap dapat memengaruhi ketimpangan pendapatan.

## 4.5. Pembahasan

### a. Pengaruh Pengeluaran Perkapita terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ( $p\text{-value} = 0.0117 < 0.05$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan pengeluaran per kapita belum diikuti oleh pemerataan pendapatan optimal, karena kenaikannya lebih terkonsentrasi pada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi yang memiliki daya konsumsi lebih besar dibandingkan kelompok berpendapatan rendah. Kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan dalam distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi.

Setiap peningkatan pengeluaran perkapita secara rata-rata 5 kabupaten cenderung meningkatkan tingkat ketimpangan pendapatan. Secara empiris, hasil penelitian ini konsisten dengan temuan[13], menunjukkan peningkatan pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan signifikan. Pada daerah industri dan perdagangan seperti Kabupaten Sidoarjo dan Gresik memiliki pengeluaran perkapita lebih tinggi dibandingkan wilayah didominasi sektor agraris seperti Bangkalan dan Lamongan. Namun, peningkatan tersebut lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, sehingga ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan semakin meningkat.

Koefisien positif tersebut merefleksikan di kabupaten dengan basis industri dan perdagangan lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas, sehingga mendorong pelebaran distribusi pendapatan. Sebaliknya, di kabupaten didominasi sektor agraris, peningkatan pengeluaran per kapita berlangsung lebih lambat dan terkonsentrasi pada kebutuhan dasar, sehingga tidak cukup kuat untuk menekan ketimpangan. Dengan demikian, nilai koefisien secara empiris menangkap perbedaan struktur ekonomi antar kabupaten, kenaikan pengeluaran per kapita di wilayah maju justru berkontribusi lebih besar terhadap peningkatan ketimpangan dibandingkan wilayah dengan tingkat pengeluaran yang lebih rendah.

Dengan demikian, hubungan positif antara pengeluaran perkapita dan ketimpangan distribusi pendapatan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum bersifat inklusif. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong kebijakan pemerataan melalui perluasan akses lapangan kerja produktif, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan investasi di sektor pendidikan dan kesehatan agar manfaat peningkatan pengeluaran perkapita dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

### **b. b. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Hasil estimasi regresi bahwa RLS memiliki koefisien bernilai negatif namun tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ( $p\text{-value} = 0.2253 > 0.05$ ). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan di 5 kabupaten penelitian cenderung berkorelasi dengan penurunan ketimpangan pendapatan, namun besarnya pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk memberikan dampak nyata. Dengan kata lain, tambahan tahun sekolah yang dicapai masyarakat belum secara konsisten diikuti oleh perbaikan distribusi pendapatan.

Secara empiris, kondisi tersebut tercermin pada perbedaan struktur ekonomi lima kabupaten. Kabupaten Gresik dan Sidoarjo, yang memiliki basis industri lebih kuat, cenderung menyediakan peluang kerja formal lebih besar bagi penduduk berpendidikan menengah dan tinggi. Sebaliknya, di Bangkalan dan Lamongan, keterbatasan lapangan kerja formal menyebabkan lulusan dengan tingkat pendidikan lebih tinggi tetap terserap di sektor informal berpendapatan rendah. Akibatnya, peningkatan RLS di kabupaten tersebut belum mampu menekan ketimpangan pendapatan secara signifikan, sebagaimana tercermin dalam kecilnya nilai koefisien regresi.

Selain itu, meskipun jumlah peserta didik jenjang SMA dan SMK di lima kabupaten relatif besar, tingginya tingkat pengangguran terbuka lulusan SMK di Jawa Timur menunjukkan bahwa peningkatan lama sekolah belum diimbangi dengan kualitas dan kesiapan kerja lulusan. Kondisi ini memperlemah transmisi pendidikan terhadap peningkatan pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, sehingga secara agregat dampak RLS terhadap ketimpangan pendapatan menjadi tidak signifikan.

Dengan demikian, hasil regresi menegaskan bahwa peningkatan RLS saja belum cukup untuk menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan di lima kabupaten penelitian. Dampak pendidikan terhadap pemerataan pendapatan sangat bergantung pada kualitas pendidikan, kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan pasar kerja, serta kemampuan daerah dalam menciptakan lapangan kerja produktif. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan lama sekolah, tetapi juga pada penguatan kualitas pendidikan vokasional, program *link and match* dengan dunia industri, serta perluasan kesempatan kerja di daerah dengan struktur ekonomi yang masih terbatas.

### **c. Pengaruh Angka Harapan Hidup terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan**

Hasil estimasi bahwa (AHH) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ( $p\text{-value} = 0.0115 < 0.05$ ). Koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan AHH secara rata-rata 5 kabupaten berkontribusi pada penurunan tingkat ketimpangan pendapatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbaikan kesehatan masyarakat berperan sebagai mekanisme penting dalam mendorong pemerataan kesejahteraan. Kesehatan merupakan investasi modal manusia yang meningkatkan produktivitas, kapasitas kerja, dan partisipasi ekonomi. Peningkatan AHH mencerminkan kualitas kesehatan yang lebih baik, sehingga memperluas peluang Masyarakat termasuk kelompok berpendapatan rendah untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi dan memperoleh pendapatan yang lebih layak. Dengan demikian, peningkatan AHH berkontribusi pada distribusi pendapatan yang lebih merata.

Secara empiris, hubungan ini tercermin pada perbedaan antar kabupaten. Sidoarjo dan Gresik, yang memiliki AHH relatif lebih tinggi, menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan Bangkalan dan Lamongan, yang AHH-nya masih relatif lebih rendah. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa daerah dengan kualitas kesehatan masyarakat yang lebih baik mampu menciptakan partisipasi ekonomi yang lebih luas dan produktif, sehingga dampak penurunan ketimpangan lebih terasa. Koefisien regresi yang signifikan secara statistik menangkap kondisi tersebut, di mana peningkatan AHH di wilayah dengan layanan kesehatan lebih baik berimplikasi nyata terhadap perbaikan distribusi pendapatan.

Selain itu, tren peningkatan AHH Jawa Timur dari 71.74 tahun 2022 menjadi 72.11 tahun 2023 menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat. Namun, hasil regresi menegaskan bahwa dampak penurunan ketimpangan akan lebih optimal apabila peningkatan AHH terjadi secara merata antar kabupaten, khususnya di wilayah dengan akses layanan kesehatan yang masih terbatas. Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan AHH merupakan instrumen efektif dalam menekan ketimpangan distribusi pendapatan, selama didukung oleh pemerataan akses layanan kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan sektor kesehatan melalui peningkatan layanan preventif, perbaikan gizi, sanitasi, serta akses fasilitas medis di daerah tertinggal, agar peningkatan angka harapan hidup dapat berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

#### **d. Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Ketimpangan Pendapatan Distribusi Pendapatan**

Hasil estimasi regresi menunjukkan bahwa variabel pernikahan dini berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan ( $p\text{-value}=0.0084<0.05$ ). Koefisien negatif ini mengindikasikan bahwa peningkatan angka pernikahan dini cenderung diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Namun, penurunan tersebut bukan mencerminkan peningkatan kesejahteraan, melainkan keseragaman pendapatan pada level rendah (*low equality in poverty*), di mana sebagian besar masyarakat berada pada kelompok berpendapatan rendah yang relatif sama.

Secara empiris, hubungan ini tercermin pada perbedaan antar kabupaten. Kabupaten Bangkalan dan Lamongan, yang memiliki tingkat pernikahan dini lebih tinggi, menunjukkan ketimpangan pendapatan relatif lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sidoarjo dan Gresik, yang angka pernikahan dininya lebih rendah. Koefisien regresi yang signifikan menangkap kondisi tersebut, di mana tingginya pernikahan dini membatasi akumulasi modal manusia terutama pendidikan dan keterampilan sehingga sebagian besar penduduk hanya mampu mengakses pekerjaan berupah rendah, khususnya di sektor informal. Akibatnya, distribusi pendapatan tampak lebih merata, tetapi pada tingkat kesejahteraan yang rendah. Pernikahan dini mendorong putus sekolah, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya peluang kerja formal. Ketika kondisi ini terjadi secara luas, ketimpangan pendapatan memang menurun, tetapi karena rendahnya variasi pendapatan di antara kelompok miskin. Dengan demikian, arah koefisien negatif mencerminkan penyempitan ketimpangan akibat stagnasi ekonomi, bukan pemerataan kemakmuran.

Oleh karena itu, temuan regresi ini menegaskan bahwa penurunan ketimpangan yang dipicu oleh pernikahan dini bersifat semu dan berimplikasi negatif terhadap pembangunan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu memperkuat pencegahan pernikahan dini melalui penegakan regulasi usia minimum perkawinan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan—terutama bagi Perempuan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut penting agar penurunan ketimpangan pendapatan ke depan didorong oleh peningkatan kualitas hidup dan produktivitas, bukan oleh keseragaman kemiskinan.

### **5. Kesimpulan**

Hasil analisis regresi data panel menunjukkan bahwa, diperoleh variabel pengeluaran perkapita berpengaruh positif dan memiliki pengaruh signifikan atas ketimpangan distribusi pendapatan, mengindikasikan bahwa peningkatan daya beli masyarakat belum merata dan justru memperlebar ketimpangan pendapatan antar kelompok. Variabel rata lama sekolah berpengaruh negatif meskipun tidak signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan pendidikan belum sepenuhnya mampu menurunkan ketimpangan akibat belum meratanya kualitas dan akses pendidikan. Sementara itu, variabel angka harapan hidup mengindikasikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan, artinya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dapat menekan ketimpangan ekonomi melalui peningkatan produktivitas. Adapun variabel pernikahan dini berpengaruh negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa meskipun ketimpangan menurun, hal tersebut lebih mencerminkan keseragaman pendapatan pada tingkat rendah daripada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu difokuskan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan

kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pencegahan pernikahan dini agar penurunan ketimpangan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Daftar Pustaka

- [1] Y. Sri Hartati, "Analisis Ketimpangan Ekonomi Di Provinsi Papua," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 14, no. 2, pp. 19–29, 2022, doi: 10.55049/jeb.v14i2.116.
- [2] S. E. Rahayu and H. Febriaty, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Propinsi Sumatera Utara," *Ekon. J. Ilmu Ekon. dan Stud. Pambang.*, vol. 24, no. 2, pp. 286–300, 2024, doi: 10.30596/ekonomikawan.v24i2.22007.
- [3] M. Farhan and S. Sugianto, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan Di Pulau Jawa," *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya, Teknol. dan Pendidik.*, vol. 1, no. 4, pp. 243–258, 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i4.29.
- [4] Nurdina Wistiatuti, "Infrastructure and Income Inequality in Indonesia," 2021.
- [5] S. I. S. Dai, S. Canon, and D. O. Bauty, "Analisis Pengaruh Rls, Pengeluaran Perkapita, Uhh, Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kbi Dan Kti," *Jesya*, vol. 6, no. 1, pp. 535–544, 2023, doi: 10.36778/jesya.v6i1.950.
- [6] M. P. Todaro and S. C. Smith, *Economic Development. Economic Development (Elevent)*, no. 1990. 2020.
- [7] F. S. Windy, "Determinants of Economic Growth in Java: Per Capita Expenditures, Population, and Contribution of Indonesian Democracy," *J. Dev. Econ. Soc. Stud.*, vol. 10, no. 1, pp. 1–52, 2022, doi: 10.21608/pshj.2022.250026.
- [8] N. G. Mankiw *et al.*, *Instructor 's Manual with Solutions Manual Principles of Microeconomics FOURTH EDITION Prepared by.*
- [9] B. P. Statistik, "Tingkat Ketimpangan Pengeluaran Penduduk Indonesia Maret 2024," *Ber. Resmi Stat.*, vol. No. 51/07/, no. 42, pp. 1–8, 2024.
- [10] B. P. S. J. Timur, "JAWA TIMUR DALAM ANGKA 2024," vol., no., 2024.
- [11] D.N.Gujarati, "Dasar-dasar Ekonometrika, Jilid 1," 2003. [Online]. Available: <https://www.scribd.com/doc/166981320/Dasar-Dasar-Ekonometrika>
- [12] G. Imam, "APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE," 2018.
- [13] J. Tumbal, G. M. V. Kawung, and W. F. I. Rompas, "Determinan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kota Manado," *J. Berk. Efisiensi*, vol. 23, no. 9, pp. 133–144, 2023.
- [14] N. Luh Gde Mitha Ardiyanti and N. Nyoman Reni Suasih, "E-Jurnal EP Unud, 12 [7]: 503-517," pp. 503–517.
- [15] N. L. G. M. Ardiyanti and N. N. R. Suasih, "Pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, investasi, dan biaya pembangunan infrastruktur terhadap ketimpangan distribusi pendapatan," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, vol. 12, no. 7, pp. 503–520, 2023, doi: 10.24843/eep.2023.v12.i07.p04.
- [16] A. M. Damanik, Z. Zulgani, and R. Rosmeli, "Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi," *E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, vol. 7, no. 1, pp. 15–25, 2018, doi: 10.22437/pdpd.v7i1.4533.
- [17] F. A. Duarsa and R. S. Wijaya, "Analisis pengaruh pengeluaran per kapita, RLS, AHH, dan jumlah penduduk terhadap ketimpangan distribusi pendapatan," *Equilibria Pendidikan: Jurnal Ilmiah Pendidikan Ekonomi*, vol. 8, no. 2, pp. 117–124, 2023, doi: 10.26877/ep.v8i2.17306.
- [18] R. P. Felangi and I. G. W. M. Yasa, "Analisis beberapa variabel yang berpengaruh terhadap angka harapan hidup di kabupaten/kota Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, vol. 10, no. 4, pp. 1447–1477, 2021.
- [19] N. Fitriani, "Problematika pernikahan dini (Studi pada Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)," Skripsi, Universitas Negeri Makassar, 2019. [Online]. Available: <http://eprints.unm.ac.id/13678/>
- [20] A. Julihanza and R. Khoirudin, "Determinan ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Sumatera," *Journal of Macroeconomic and Social Development*, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2023, doi: 10.47134/jmsd.v1i2.93.
- [21] F. Lestari, F. Z. Olilingo, and H. Mopangga, "Analisis ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo tahun 2018–2022," *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, vol. 13, no. 2, pp. 306–318, 2024, doi: 10.35906/equili.v13i2.2003.
- [22] E. N. Manurung and F. Hutabarat, "Pengaruh angka harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran per kapita terhadap indeks pembangunan manusia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*, vol. 4, no. 2, pp. 121–129, 2021, doi: 10.35326/jiam.v4i2.1718.
- [23] N. Nurhikmah, B. T. Carolin, and R. Lubis, "Faktor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini pada remaja putri," *Jurnal Kebidanan Malabiyati*, vol. 7, no. 1, pp. 17–24, 2021, doi: 10.33024/jkm.v7i1.3110.

- [24] L. Nurlutfiyah, M. D. Lestari, and R. S. Utari, "Pengaruh pernikahan dini terhadap pendapatan keluarga di Pulau Jawa," *HERO (Himie Economic Research Olympiad)*, pp. 215–220, 2022.
- [25] I. P. G. M. Putra and M. H. U. Dewi, "Pengaruh sosial ekonomi terhadap usia perkawinan pertama perempuan di Kecamatan Denpasar Selatan," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, vol. 10, no. 5, pp. 1860–1889, 2021.
- [26] D. A. A. Putri, "Pengaruh disparitas pendidikan terhadap ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," *Parahyangan Economic Development Review*, vol. 2, no. 1, pp. 29–46, 2024, doi: 10.26593/pedr.v2i1.7416.
- [27] D. Y. Putri and R. S. Aminda, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta," *Journal of Development Economics Digital*, vol. 3, no. 1, pp. 87–108, 2024.
- [28] M. S. Rohman, R. Purwono, and N. F. Ramdaniyah, "Investigating the nexus of child marriage and economic growth in Indonesia," *Jurnal Dinamika Ekonomi*, vol. 9, no. 2, pp. 230–242, 2024, doi: 10.20473/jde.v9i2.60547.
- [29] J. Tumbal, G. M. V. Kawung, and W. F. I. Rompas, "Determinan ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Manado," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 23, no. 9, pp. 133–144, 2023.
- [30] G. A. P. Y. P. Utami and N. N. Yuliarmi, "Pengaruh tingkat pendidikan, umur, dan pengalaman kerja terhadap pendapatan pekerja di kawasan objek wisata Tanah Lot," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, vol. 10, no. 7, pp. 2807–2834, 2019.
- [31] A. Wardhana, B. Kharisma, and M. Z. Fauzy, "Determinan ketimpangan pendidikan provinsi di Indonesia," *Jurnal Perspektif*, vol. 21, no. 1, pp. 101–111, 2023, doi: 10.31294/jp.v21i1.15610.
- [32] A. R. Widayanti, P. Pramudianti, Z. T. Rahayu, A. K. Mufidah, and S. Retnosari, "Determinan dan ketimpangan sosial ekonomi pernikahan dini pada kalangan wanita di Kabupaten Magelang," *Ekonomika*, vol. 11, no. 2, pp. 413–437, 2024, doi: 10.30640/ekonomika45.v11i2.2546.